

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
( Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah  
Negeri Bone)**

**Oleh**

**WAHYU RISTINA**

**NIM 105730503614**



**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
( Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah  
Negeri Bone)**

**Oleh**

**WAHYU RISTINA**

**NIM 105730503614**

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Dan Ibunda Serta Kakak Dan Adik-Adikku, Serta Orang - Orang Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati, Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku Dari Segi Materi Maupun Non-Materi

### **MOTTO HIDUP**

Semakin kau peduli bagaimana terlihat di hadapan Allah, semakin kau tak peduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan manusia.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Sekolah Usaha  
Perikanan Menengah Negeri Bone

Nama Mahasiswa : WAHYU RISTINA  
No. Stambuk : 105730503614  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia  
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018  
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Agussalin HR., SE.MM  
NIDN. 0911115701

Pembimbing II

Muchriana Muchran, SE.M.Si, Ak., CA  
NIDN. 0930098801

Mengetahui,

Dekan



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP  
NBM. 107 3428





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **WAHYU RISTINA, NIM : 105730503614**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:123/Tahun 1440H/2018M, Tanggal 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
  2. Faidhul Adzim, SE.,M.Si (.....)
  3. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
  4. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM : 903078**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU RISTINA  
Stambuk : 105730503614  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Sekolah Usaha  
Perikanan Menengah Negeri Bone

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan kedepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun***

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018  
Yang Membuat Pernyataan



WAHYU RISTINA

Mengetahui,

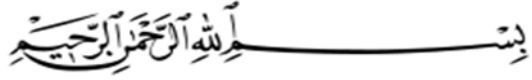


Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903078

Ketua Prodi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP  
NBM. 107 3428

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone) ” dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan serta bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr.Agussalim HR.,SE.MM dan Muchriana Muchran,SE.M.Si,Ak.,CA selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Pimpinan SUPM Negeri Bone dan seluruh Staf kantor SUPM Negeri Bone yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Ponijo dan Ibunda tercinta Dariani,serta saudara-saudaraku saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
8. Teman-teman akuntansi 10 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fil Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 22 Desember 2018

Penulis



## **ABSTRAK**

Wahyu Ristina, 2018 . **Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan ( Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone )** Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Agussalim Dan Pembimbing II Ibu Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone dan kesesuaiannya dengan tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisa data untuk memberikan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah dan kemudian melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas untuk kemudian membuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis bahwa secara keseluruhan kinerja kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik dengan nilai capaian sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2016, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone boleh dikatakan sudah berhasil dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **ABSTRACT**

Wahyu Ristina, 2018. Accountability Analysis of the Performance of Government Agencies of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (Case Study at Bone State Middle Fisheries Business School) Thesis Faculty of Economics and Business Accounting Department of Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Mr. Agussalim and Supervisor II Mrs. Muchriana Muchran.

This study aims to determine and analyze the achievement of the performance of the Medium Fisheries Business School (SUPM) Bone and its suitability with the goals, objectives, and programs that have been established. Data collection techniques used are data observation techniques. This research uses descriptive qualitative method that is collecting, classifying, interpreting and analyzing data to provide a clear and accurate answer to the formulation of the problem and then make comparisons to theories related to the problem being discussed and then make conclusions and suggestions that are considered important.

The results of the research and discussion carried out by the author that overall the performance of the Bone Fisheries Business School (SUPM) activities in general have shown the achievement of very good performance with a performance value of 100%. Thus it can be said that for 2016, the Medium Fisheries Business School (SUPM) Bone may be said to have succeeded in achieving set targets.

Keywords: Performance, Government Institution Performance Accountability Report

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Umum Akuntabilitas .....	6
B. Pengertian Umum Kinerja .....	8
C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	24

D. Penelitian Terdahulu .....	37
E. Kerangka Fikir.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
B. Teknik Pengumpulan Data.....	48
C. Jenis Dan Sumber Data.....	49
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Metode Analisis.....	50
F. Defenisi Operasional.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
B. Hasil Penelitian .....	61
C. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabael 4.1 Jumlah Pegawai SUPM BONE 2016.....	58
Tabel 4.2 Rincian Anggaran dan Realisdasi Belanja TA 2016 .....	61
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Tahun 2016 .....	61
Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi PNBPN 2015 dan 2016 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Pengukuran Kinerja .....	15
Gambar 2.2 Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.....	24
Gambar 2.2 Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PSS).....	32
Gambar 2.4 Kerangka Fikir .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Seperti pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang didirikan berdasarkan KEPMEN DKP Nomor :KEP.26 L/MEN/2001 Tanggal 1 Mei 2001 dan telah diperbaharui dengan PERMEN KP No. Per. 13/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam proses penyelenggaraan, telah banyak hal yang dilakukan sesuai dengan tuntutan visi dan misi yang diemban.

Proses ini sangat ditentukan oleh kinerja aparatur dalam pengelolaan sumberdaya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone. Untuk melihat sejauh mana kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone berjalan, maka dari uraian di atas penulis mencoba meneliti akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah dengan mengambil

judul Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017 (Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone).

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dari entitas (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun wajib menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impac*).

1. *Imput*, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.

2. *Output*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. *Outcome*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
4. *Benefit*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaat yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. *Impac*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari mamfaat.

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja oerorganisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintah mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan *responsive* pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.

2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintah serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Pengelolaan anggaran pada institusi tertentu mempengaruhi perilaku-pelaku dalam institusi untuk bertindak lebih akuntabel. Informasi keuangan terkait anggaran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas organisasi tersebut. Transparansi merupakan jantung dari penganggaran dan pengelolaan keuangan terutama dalam situasi korupsi sektor pendidikan tinggi (Asif & Aurangzeb, 2012).

Akuntabilitas merupakan hubungan dalam suatu organisasi berupa *"Giving and demanding of reasons for conducts"* (Roberts & Scapens, 1985). Namun bila dikaitkannya dengan konsep anggaran mengandung arti suatu hubungan antara pemberi dan penerima tanggung jawab yang membuat pemberi tanggung jawab mempunyai hak atau kekuatan untuk meminta atau memaksa penerima untuk memberikan pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan. Di sisi lain penerima tanggung jawab mempunyai keinginan atau kewajiban untuk patuh terhadap persyaratan yang diberikan oleh pemberi (Messner, 2009).

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting karena menjadi penuntun bagi langkah selanjutnya, terutama dalam mengkonstruksi suatu analisis. Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, masalah yang diungkapkan oleh penulis adalah Apakah kinerja pada sekolah usaha perikanan menengah negeri bone semakin baik sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, Karena tujuan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang ingin dicapai. Tujuan dilakukannya analisis Akuntabilitas Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian kinerja sekolah usaha perikanan menengah negeri bone sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **D. Mamfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Teoriti, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan atau wawasan di bidang kinerja pada sektor publik terutama masalah akuntabilitas kinerja pada instansi daerah SUPM Negeri bone.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pegawai SUPM bone Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai SUPM bone.
  - b. Bagi pihak lain diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Umum Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance*, yang mana akuntabilitas atau pertanggungjawaban berarti mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya. *Good governance* itu sendiri adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan ketiga prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ihyaul Ulum (2005:29), arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

*Governance* menurut Mardiasmo (2007:17): "Sebagai cara mengelolaurusan-urusan publik". Sedangkan pengertian dari *Good governance* seringdiartikan sebagai pemerintahan yang baik. World Bank dalam Mardiasmo(2008:135) mendefinisikan *good governance*, Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid danbertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yangefisien, penghindaran salah alokasi dam investasi, dan pencegahan korupsibaik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaranserta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitasusaha.Akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum (2005:40) "Suatupertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan olehmasyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalandi dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telahditetapkan Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung denganaktivitas birokrasi dalam memberikan memberikan pelayanan sebagaikontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidaklangsung dari masyarakat.

Pemerintah telah mengambil langkah strategik dalam penataan systempenyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada good governancetersebut. Melalui inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pemerintah menimbang bahwa dalamrangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dan untuk, melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perludikembangkan suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya Inpres tersebut seluruh instansi pemerintah diharapkan untuk akuntabel dalam mengemban fungsinya.

## **B. Tinjauan Umum Kinerja**

### **1. Definisi Kinerja**

Menurut Drs. Sumadji P. dkk (2006:518) kinerja atau *performance* adalah: "Istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, wiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan, pertanggungjawaban manajemen, dan sejenisnya. "Kinerja menurut Mohammad Mahsundkk. (2006:145): "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi." Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa

ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

## **2. Definisi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja menurut Robertson yang dikutip dari Mohamad Mahsun dkk. (2006:141), Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa: kualitas, barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Mulyadi dan Johny Setyawan "Pengukuran kinerja dalam organisasi fungsional hirarkis dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban dan menentukan ukuran kinerja pusat pertanggungjawaban yang dibentuk". Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan ukuran kinerja yang cocok dengan karakteristik operasi pusat pertanggungjawaban yang dibentuk. Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektor publik. Pada organisasi bisnis, kinerja penyelenggaranya dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya. Pada organisasi sektor publik pengukuran keberhasilannya lebih kompleks karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja.

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud (Mardiasmo, 2002:121), yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Johny Setyawan (2001: 353): "Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya". Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mengkaji pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter (Mohamad Mahsun. dkk., 2006:81). Konsep efisiensi berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu, efisiensi

merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses, dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan (Mulyadi dan JohnySetyawan, 2001:378).

### 3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastian (2006:267) berupa: "Indikator Masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Keluaran(*Output*), Indikator Hasil (*Outcome*), Indikator Manfaat (*Benefit*), Indikator Dampak (*Impact*)".

- a. Indikator Masukan (*Input*) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.
- b. Indikator Proses (*Process*) Rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh pemanfaatan sejumlah *input*. Sedangkan ekonomi yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang ditentukan untuk itu.

- c. Indikator Keluaran (*Output*) Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
- d. Indikator Hasil (*Outcome*) Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- e. Indikator Manfaat (*Benefit*) Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat okasi dan waktu).
- f. Indikator Dampak (*Impact*) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan



indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

#### **4. Peranan Indikator Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2005:128), peranan indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manjerial.
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja.
- f. Untuk menunjukkan efektifitas.
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

Indikator kinerja ini berperan dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator kinerja

pada akhirnya akan digunakan sebagai control sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

#### **5. Aspek yang Diukur pada Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja menurut Bastian (2001 : 331 – 332) biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini: “Aspek finansial, Kepuasan pelanggan, Operasi dan Pasar Internal, Kepuasan pegawai, Kepuasan komunitas dan *shareholder, stakeholder, Waktu*”.

##### **a. Aspek finansial**

Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

##### **b. Kepuasan pelanggan**

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

##### **c. Operasi dan Pasar Integral**

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, organisasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

##### **d. Kepuasan pegawai**

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sangat menentukan kelangsungan organisasi.

e. Kepuasan komunitas dan *Shareholder/ Stakeholder*

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasikan kepuasan para *stakeholder*.

f. Waktu

Informasi untuk pengukuran kinerja haruslah informasi yang terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan. Pengukuran kinerja atas aspek-aspek diatas bertujuan untuk memperoleh hasil kinerja yang nyata dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

## 6. Siklus Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2006:281) “Terdapat 5 (lima) tahap untuk melakukan pengukuran kinerja yaitu Penskemaan Strategik, Penciptaan Indikator, Pengembangan Sistem Pengukuran Data, Penyempurnaan Ukuran Kinerja dan Pengintegrasian dengan Proses Manajemen”.

Gambar. Siklus Pengukuran Kinerja



Berikut uraian masing-masing tahap ( Gambar 2.1) sebagai berikut:

a. Perencanaan Strategik

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

b. Penetapan Indikator Kinerja

Setelah perumusan strategik, instansi pemerintah perlu menyusun dan menetapkan ukuran/indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam proses ini. Untuk beberapa jenis program tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk didefenisi. Indikator kinerja dapat berupa indikator *input*, *process*, *output*, *outcomes*, *benefit* atau *impacts*. Indikator/ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung. Misalnya: jumlah klaim yang diproses

c. Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja

Ada tiga kegiatan dalam tahap ini. Pertama, harus yakin bahwa mempunyai data atau pencarian data yang diperlukan terus dilanjutkan sesuai dengan siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. Terakhir, menggunakan data pengukuran kinerja yang dihimpun, dan hal ini harus dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti.

d. Penyempurnaan Ukuran

Pada tahapan ini, pemikiran atas indikator hasil (*outcomes*) dan indikator dampak (*impacts*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*).

e. Pengintegrasian Dengan Proses Manajemen yaitu

Pada saat ukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

## 7. Manfaat Indikator Kinerja

Manfaat dari tuntutan skema indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan organisasi.
- b. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktifitas.
- c. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas.
- d. Tersedianya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
- e. Tersedianya fasilitas *setting of target* untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggung jawaban organisasi kepada pemilik saham.

Penetapan indikator kinerja pada akhirnya akan digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. Indikator kinerja akan membantu dalam menunjukkan dan memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

## 8. Syarat-syarat Indikator Kinerja

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja, yaitu:

- a. Spesifik yang jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b. Dapat diukur secara objektif yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur kinerja yang berkesimpulan sama.
- c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
- d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat serta dampak.
- e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Syarat-syarat dalam membuat indikator kinerja yang baik harus dapat dipenuhi untuk memperoleh indikator kinerja yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **9. Langkah-langkah Menyusun Indikator Kinerja**

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkah tersebut menurut LAN dan BPKP (2000) adalah sebagai berikut:

- a. Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu. Rencana strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan/sasaran
- b. Identifikasi data/informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini, data/informasi yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
- c. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijaksanaan / program / kegiatan.

## **10. Evaluasi Kinerja**

Menurut Bastian (2001:344), "Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat". Bastian (2001:344) meyakini cara-cara evaluasi kinerja menurut Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntansi Kinerja adalah dengan membandingkan antara:

- a. Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang nyata.

- b. Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya (*benchmarking*).
- c. Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.
- d. Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.
- e. Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

#### **11. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/DU6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat



dan dampak diukur dalam rangka menilai pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.
3. Mengukur tingkat ketercapaian, tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bias diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. informasi capaian kinerja dapat dijadikan:
  - a. *Feedback*. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan

pemberian reward dan punishment terhadap manajer dan anggota organisasi.

- b. Penilaian kemajuan organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi.
- c. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun *stakeholders*.

## **12. Penilaian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 Penjelasan atas Pasal 5 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra didasarkan pada indikator:

- a. Dampak, bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
- b. Manfaat, bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah.
- c. Hasil, bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
- d. Keluaran, bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

- e. Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

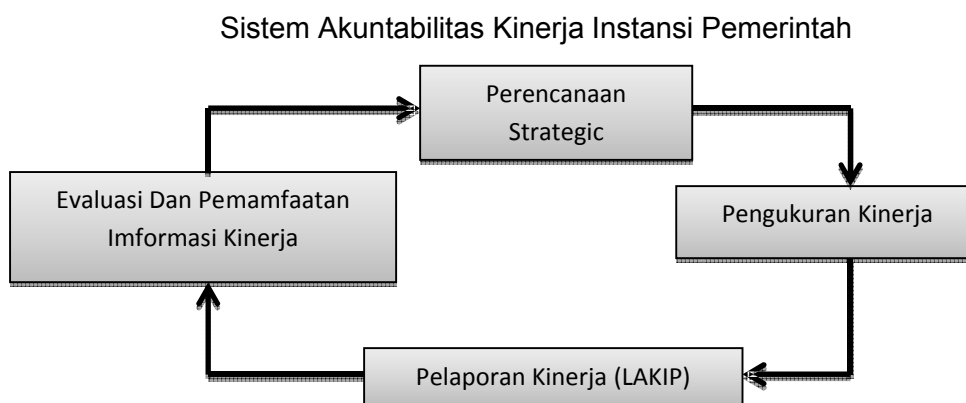
Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat, daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, system penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

### **C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

#### **1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Akuntabilitas kinerja dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.



Gambar.2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Manfaat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain:

- 1) Membangun *result oriented governance*
- 2) Mendorong peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan sustainability/konsisten perbaikan
- 3) Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja
- 4) Membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
- 5) Mendorong pemerintahan yang memprioritaskan dan focus pada bidang-bidang yang strategic
- 6) Mendorong pada penyelenggara pemerintah agar amanah dalam melaksanakan tugasnya
- 7) Mendorong pertanggungjawaban yang transparan dan apa adanya
- 8) Merupakan instrument pencegahan KKN (*anti corruption preventive approach*).

Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan :

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategic
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi pemerintah
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman

- d. pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah
- e. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
- f. Mengukur pencapaian kinerja
- g. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
  - 1) Menganalisis hasil pengukuran kinerja
  - 2) Menginterpretasikan data yang diperoleh
  - 3) Membuat pembobotan (*rating*) keberhasilan pencapaian program
  - 4) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.

## **2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

### **1) Definisi dan Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan pencapaian misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

## **2) Dasar Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dasar hukum LAKIP antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No.2 239/IX/6/8/2003. Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.01/2006 tentang Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP- 83/PB/2005 tanggal 31 Mei 2005 beserta perubahannya.

### 3) Prinsip-Prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Prinsip-prinsip yang lazim dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Menurut Indra Bastian (2001:350) prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban (*adanya responsibility center*), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*conrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporannya.
2. Prinsip Pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan *target/standar/skema/budget*, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
3. Prinsip manfaat, yaitu laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup



kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

- b. Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya.
- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

#### **4) Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing Instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran Negara yang dibelajarkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012, Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri atas:

- a. Ikhtisar Eksekutif, dimana pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta pencapaian tujuan dan sasaran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- b. Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi.
- c. Rencana Strategik, dimana pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategik dan rencana kinerja.
- d. Akuntabilitas Kinerja, dimana pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

- e. Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja utama instansi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
- f. Lampiran-lampiran dimana setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, metode, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya dimuat dalam lampiran.

Predikat capaian kinerja mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan sebagai berikut :

100 = Sangat Baik

85 – 99 = Baik Sekali

70 - <85 = Baik

55 - <70 = Cukup

<55 = Kurang

Predikat kinerja merupakan rencana tingkat capaian organisasi/satuankerja (satker). Pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Format formulir pengukuran tersebut berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2012 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut

Gambar 2.3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

NO	Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		ket
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6

Sumber : Pedoman Penyusunan dan Pelaporan LAKIP, 2012  
*Persentase Pencapaian Target = Realisasi x 100%Rencana*

### 5) Fungsi LAKIP

Pentingnya LAKIP bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:

- a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi informasi dan data yang telah diolah;
- b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi;
- c. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi;
- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-

fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

#### **6) Manfaat LAKIP**

Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur pada Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 pasal 18 adalah berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- b. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- c. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
- d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- e. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

#### **7) Sasaran Sistem LAKIP**

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi Sasaran Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **8) Ruang Lingkup Sistem LAKIP**

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup
  1. Tugas pokok dan fungsi dan instansi pemerintah
  2. Program kerja yang menjadi isu nasional
  3. Aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Penentuan ruang lingkup Sistem LAKIP akan membuat proses dari pengukuran kinerja semakin terfokus

sehingga dapat menghasilkan LAKIP yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **9) Prinsip-prinsip LAKIP**

Menurut Bastian (2001 : 350), penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Disamping itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

- a. Prinsip mempertanggungjawabkan (adanya *responsibility center*), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*controllable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan,
- b. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target, standar, skema, *budget*, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya.

#### **10) Isi LAKIP**

Isi LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabaran yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah. Selain itu, menurut Bastian (2001 : 350) perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai:

- a. Aspek keuangan
- b. Aspek sumber daya
- c. Aspek sarana dan prasarana
- d. Metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama instansi.

Menurut Bastian (2001:351) agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari alokasi APBN (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- b. Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasikan pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.
- d. Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak



dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*Policy Accountability*).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Alfira Sofia Dan Bagus Husen (2013). Analisis transparansi dan Akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website, pengungkapan informasi yang di teliti adalah informasi keuangan dan informasi non keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah kota/kabupaten diindonesia pada website pemerintah tersebut. Pengungkapan informasi dalam penelitian ini hanya memperhatikan fitur fitur yang ada pada website tersebut yang penentuannya ditentukan berdasarkan beberapa teory dan undang-undang yang relevan. Hasil dari penelitiannya adalah ditinjau dari nilai rata-rata indeks dapat disimpulkan bahwa untuk pengungkapan informasi keuangan memiliki nilai rata-rata yang sangat rendah(9,9) hal tersebut menunjukkan kota/kabupaten di indonesia sebagian besar masih belum memasukkan fitur informasi keuangan dalam websitenya.

Darwanis dan Sephi Chairunnisa (2013). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPA yang ada di Provinsi Aceh berjumlah 39 SKPA. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan anggaran yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Pelaporan, Kepala Seksi pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan Kepala Sub bagian keuangan yang berjumlah 102 responden. Pada penelitian ini, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya ditinjau dari aspek penerapan akuntansi keuangan daerah,

pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa variabel independen lain sehingga dapat diketahui bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.

Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015), *Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru Indonesia*, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), (Empirical Study On the regional work units Pekanbaru). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib LAKIP pada pemerintah Kota Pekanbaru di Propinsi Riau, yang berjumlah 39 unit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala sub-bagian Keuangan yang terdapat di 29 SKPD Kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan *survey*. Karena metode *survey* merupakan metode pengumpulan data yang

menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang menggunakan kuesioner pada 39 SKPD di Pemerintah Kota Pekanbaru dan data sekunder yang di peroleh dari referensi, buku internet atau data instansi terakit, Hasil penelitian Kompetensi diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Yang mana ttabel 2,000 diperoleh dari  $(n - k - 1 = 67 - 4 - 1 = 62)$  dengan tingkat signifikansi  $0,05/2 = 2,000$ .

Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini, dan Ida Bagus Putra Astika (2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia, Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk variabel kompetensi dan komitmen organisasi sebagai data primer dan hasil evaluasi LAKIP sebagai data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tabanan atau di Kabupaten Tabanan. Responden penelitian adalah seluruh pimpinan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015. menunjukkan bahwa dari 41 kuesioner yang disebar, tingkat pengembaliannya sebanyak 95,12%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 (4,88%) disebabkan karena responden tidak mengembalikan kuesioner dengan alasan kesibukan. Secara keseluruhan kuesioner yang terhimpun kembali dapatdigunakan karena data yang disampaikan oleh responden cukup lengkap.

Hery Harjono Muljo,Heny Kurniawati, dan Pahala (2014). Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Pengaruh

Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan melalui suatu hipotesis yang dibangun akan diuji dengan formula statistik dan teknik analisis tertentu. Ada tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini guna mengetahui signifikansi dari hubungan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung. Populasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah unit-unit yang terkait dalam pengelolaan anggaran di Universitas Bina Nusantara, sedangkan sampelnya adalah adalah 15 unit kerja di lingkungan Universitas Bina Nusantara. Hasil analisis *rank spearman correlation* mengungkapkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,339 yang artinya pengaruh hubungan rendah dan searah (karena positif). nilai koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,115 yang artinya variabel Akuntabilitas mempengaruhi Pengelolaan anggaran sebesar 11,5% dan sisanya 88,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu hasil juga menunjukkan thitung (2,194) lebih besar dari pada nilai ttable (2,024), sehingga  $H_0$  diterima yaitu "Akuntabilitas mempengaruhi Pengelolaan Anggaran".

Komang sri endrayani, Made pradana adi putra, dan Nyoman ari sonya darmawan (2014). Jurusan akuntansi Universita Pendidikan Ganesha singaraja indonesia, Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada dinas kehutanan UPT KPH Bali tengah kota singa raja). Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatifnya adalah

anggaran dan realisasi dari Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah serta hasil kuesioner berupa jawaban responden yang diukur dengan skala *likert*, yang mana sikap responden dari yang sangat tidak setuju diwakili oleh poin (1) hingga sangat setuju diwakili oleh poin (5). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah yang berkantor di Kota Singaraja. Berdasarkan hasil uji validitas variabel X (anggaran berbasis kinerja) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 – 0,018 yang berarti nilai signifikansinya < dari 0,05 dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji validitas variabel Y (akuntabilitas kinerja) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 – 0,028 yang berarti nilai signifikansinya < dari 0,05 dinyatakan valid. Hal ini diartikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji reliabilitas untuk variabel anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja, menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* secara simultan atas 15 dan 19 item. Nilai *alpha* dibandingkan dengan rtabel, yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 34, maka diperoleh nilai r 0,3291. Dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja > 0,60 yaitu sebesar 0,831 dan 0,863 dan semua nilai *alpha* lebih besar dari rtabel. Jadi dapat disimpulkan untuk variabel anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja, nilai item secara parsial maupun komposit dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien determinasi atau *R square* yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1%

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja.

Mentari Cefrida S ,Dr. Emrinaldi Nur DP, SE, M.Si, Ak ,H. Mudrika Alamsyah dan Hasan, SE. M.Si, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintah terkait di kota Pekanbaru yang berjumlah 99 unit. Sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas /Instansi terkait dan Sekretaris Dinas/Instansi atau perwakilan dari dinas tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan menggunakan kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, Pengujian pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan pada instansi pemerintah kota Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan Pengujian pengaruh variabel pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan

pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Ni Kadek Rina Primayoni, Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana (2014). Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung), Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Dinas- Dinas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Setelah data diuji dengan uji kualitas data dan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, mendapatkan persamaan:  $Y = 15,844 + 0,461X_1 + 0,288X_2 + \epsilon$ , menunjukkan bahwa nilai  $\alpha = 15,844$ , nilai koefisien  $\beta_1 = 0,461$  dan nilai koefisien  $\beta_2 = 0,288$ . Tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y).

Reni Yulianti, Drs. H. Hardi, SH, MH, MM, Ak, CPA, CA, dan Drs. H. Rusli, MM, Ak, CA (2014), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan), Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Penelitian ini juga diarahkan pada objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang ada di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel *nonprobabilitas* dengan *purposive sampling* yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang ada di Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel pengendalian akuntansi (X3) dengan diperoleh thitung sebesar 3,121. Jika dibandingkan dengan ttabel pada signifikan  $\alpha=5\%$  yakni sebesar 1.982. Dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel ( $3,121 > 1.982$ ), artinya  $H_0$  diolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian akuntansi (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pelalawan Hasil pengujian validitas data terhadap variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan) dan variabel dependen (akuntabilitas kinerja pemerintah daerah) disimpulkan semua data valid.

Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian *intern* Sebagai *variable intervening* (studi *empiris* pada satuan kerja perangkat daerah kota salatiga). Jurusan akuntansi ekonomika dan



bisnis Universitas Depongoro, Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei dengan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria pejabat struktural dan aparat yang memiliki peran dalam proses penyusunan anggaran (RKA-SKPD) dan memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan anggaran karena anggaran disusun secara periodik dan dalam satu periode anggaran adalah satu tahun. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Salatiga karena berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitasmkinerja instansi pemerintah daerah, kota salatiga memperoleh predikat D (kurang) dengan skor 0-30 pada tahun 2011. Hasil dari penelitiannya adalah, Pada hasil persamaan regresi 1 untuk menjawab hipotesis 1 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sistem pengendalian intern sepenuhnya terbukti. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap sistem pengendalian intern dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan hipotesis 1 diterima, artinya bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Netty Herawaty (2011) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaranberpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **E. Kerangka Pikir**

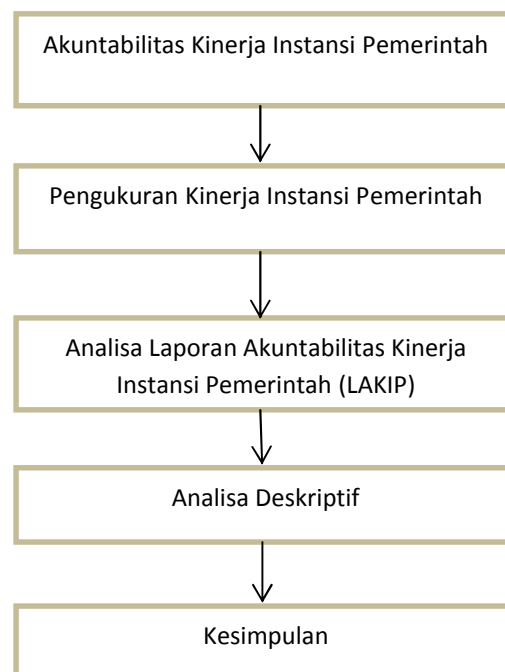
Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak-pihak yang diberi kepercayaan dalam hal ini instansi pemerintah dimana akan mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugasnya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tuntunan untuk menyajikan sistem pertanggungjawaban yang lebih baik, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan penskemaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing instansi dan jajarannya. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKIP yang dilaporkan pada setiap akhir periode pelaksanaan program, kegiatan. Sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam LAKIP dimaksudkan sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Melihat hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone dengan menggunakan analisa deskriptif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara ringkas kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema kerangka pikir sebagai berikut :

Gamba.2.4. Kerangka fikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasii Penelitian untuk memperoleh data adalah dilakukan pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone dan penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 bulan, mulai dari bulan Agustus 2018-September 2018. Selama waktu 2 bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

1. Observasi lapangan, metode observasi juga dilakukan dalam penelitian ini, metode ini digunakan dengan maksud mengetahui respon subyek yang diteliti mengenai permasalahan yang ada. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti (*direct observation*). Observasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku subyek pada saat observasi berlangsung. Data yang diperoleh dari observasi langsung akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden.
2. Dokumen, teknik pengumpulan data dengan dokumen juga digunakan dalam penelitian ini, pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pada sekolah usaha perikanan menengah negeri bone.

3. Wawancara, pengumpulan data yang di peroleh dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada responden.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data atau informasi yang diperoleh dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone yang relevan dengan judul skripsi yang diambil oleh penulis, misalnya data berupa struktur organisasi, rencana strategik, rencana kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) beserta keterangan tambahan berupa penjelasan tentang laporan tersebut.
- b. Data kuantitatif adalah data berupa hasil pengukuran kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone tahun anggaran 2016.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu Data Sekunder, berupa catatan atau dokumentasi dari tempat penelitian berupa data-data mengenai Laporan kinerja Sekolah usaha perikanan menengah negeri bone.

### **D. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.

### E. Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menganalisa data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah dan kemudian melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas untuk kemudian membuat kesimpulan dan sara-saran yang dianggap penting.

Perhitungan presentase pencapaian target dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus untuk perhitungan anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan Program, kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

100	:	Sangat Baik
85 s.d 99	:	Baik Sekali
70 s.d <85	:	Baik
55 s.d <70	:	Cukup
>55	:	Kurang

## **F. Definisi Operasional**

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi laporan perwujudan pelaksanaan kewajiban (tugas pokok dan fungsi Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone tahun anggaran 2016)
2. Rencana strategis adalah rancangan hasil yang ingin dicapai yang berisivisi, misi, tujuan, sasaran pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.
3. Kinerja adalah tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu berupa pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.
4. Rencana Kinerja adalah rancangan kerja sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala bagian umum dan Kepala Bidang pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.
5. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.
6. Target kinerja adalah persentase pencapaian kinerja pada Sokalah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone

Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bone, merupakan peningkatan status dari SPP-SPMA Daerah Tingkat II Bone menjadi SPP Negeri Bone sejak Tanggal 14 Agustus 1986 yang dituangkan penyerahannya kepada Departemen Pertanian c.q Badan Diklat Pertanian melalui Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Bone No.219/VIII/1986 Tanggal 6 Agustus 1986. Sejak Tahun tersebut SPP Negeri Bone berlokasi di Kampus lama di JL.Biru Watampone sekarang JL.Jenderal Sudirman bekas Kantor Sekretariat Bimas Kabupaten Bone.

Program Studi yang dilaksanakan ada 2 yaitu :

1. Budidaya Air Payau (BAP) jumlah siswa 42 orang
2. Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan jumlah siswa 74 orang.

Pada tanggal 17 Juli 1987 seluruh aktivitas SPP Negeri Bone dipindahkan dari kampus lama di Jalan Biru Watampone ke kampus baru di Waetuwo dengan penuh keterbatasan. Sejalan dengan keterbatasan tersebut, maka sesuai SK Menteri Pertanian No.121/Kpts/DL.210/1989 Tanggal 22 Februari 1989, tentang Kurikulum dan Program Studi SPP, maka SPP Negeri Bone mulai Tahun 1989



menyelenggarakan Program Studi Budidaya Perikanan dan telah meluluskan sebanyak ± 2.000 orang siswa yang tersebar diseluruh pelosok tanah air Indonesia.

Pada bulan April 1993 sesuai SK Menteri Pertanian No.299/Kpts/KP.430/4/1993 telah terjadi pergantian Kepala SPP Negeri Bone ke II dari Bapak Drs.Maman Tjarmana,M.Ed. (Alm) ke Bapak Drs. Rajudin Samad. Tahun Ajaran 1994/1995 sesuai surat Kapusbindiktan Nomor .DL.210/388/1994, tanggal 22 Januari 1994, SPP Negeri Bone mulai membuka Program Studi Penangkapan Ikan, namun hanya satu angkatan sampai lulus karena minimnya sarana dan tenaga pendidik dalam bidang Penangkapan. Pada bulan Juni 1995 SPP Negeri Bone telah memperlihatkan keunggulan tingkat nasional dalam hal ini, memperoleh penghargaan dari :

1. Kepala Badan Diklat Pertanian tentang prestasi dalam bidang Manajemen Penyelenggaraan Sekolah
2. Menteri Pertanian tentang unit kerja berprestasi di Bidang Diklat Pertanian

Pada bulan Juli 1996 SPP Negeri Bone diberikan kepercayaan oleh Kepala Badan Diklat Pertanian sesuai SK. Kepala Badan Diklat Pertanian No.177/Kep/DL.110/7/1996 tentang penunjukan Koordinator SPP D/S se Sulawesi Selatan II dan se Sulawesi Tenggara. Pada bulan Mei 1998 telah terjadi penggantian Kepala SPP Negeri Bone yang ke III sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No.488/Kpts/KP.430/5/1998, Tanggal 8 Mei 1998 yakni Bapak Drs.Rajudin Samad kepada

penggantinya Bapak Agoes Irianto, S.Pi. Pada bulan Juli Tahun 2000 sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.250/M.PAN/7/2000, Tanggal 19 Juli 2000 tentang persetujuan pengalihan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dibidang Perikanan ke Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, maka sejak itu pula SPP Negeri Bone di bawah naungan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone sebelumnya bernama Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bone, adalah merupakan UPT Badan Pengembangan Manusia dan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian yang ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Pertanian No.532/Kpts/OT.210/8/1988 pada tanggal 4 Agustus 1988.

Berdasarkan Keppres No.136 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.147 Tahun 1999 terbentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Dalam rangka menghindari duplikasi dan ketidak efisienan dalam penanganan kegiatan perikanan serta guna lebih mengarahkan seluruh kegiatan lembaga-lembaga perikanan dalam kerangka pembangunan kelautan dan perikanan, maka sesuai dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.250/M.PAN/7/2000 tanggal 19 Juli 2000, seluruh instansi perikanan yang selama ini di bawah Departemen Pertanian ( termasuk di dalamnya SPP Negeri Bone ) dialihkan ke Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Selanjutnya, guna lebih memantapkan kedudukan, tugas dan fungsi seluruh Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri

bidang Perikanan ditetapkanlah organisasi dan tata kerja SPP Negeri melalui Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Perikanan No.78 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000. Dalam perjalanannya nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih menyelaraskan antara tugas dan fungsi institusi dengan nomenklaturnya maka nama Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bone diubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.26L/MEN/2001 Tahun 2001 tanggal 1 Mei 2001. Pada bulan februari Tahun 2003 terjadi pergantian Kepala SUPM Negeri Bone yang ke IV sesuai surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.10/SJ.DKP/KP.141/2003, Tanggal 24 februari 2003 yakni dari Bapak Agoes Irianto,S.Pi kepada Bapak Ir.Idham Ruray,M.P.

Pada Bulan April Tahun 2009 terjadi pergantian Kepala SUPM Negeri Bone yang ke V sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP 07/SJ-DKP/KP.430/2009. Tanggal 13 April 2009 yakni dari Bapak Ir.Idham Ruray,M.P. kepada Bapak Ir.Yip Regan,M.P. Pada Bulan januari 2016 telah terjadi penggantian Kepala SUPM Negeri Bone yaitu dari Ir. Yip Regan, M.P ke Pak Nurdin Kasim, S.St.Pi, M.Si. Sejak berdirinya sampai dengan Tahun Pelajaran 2015/2016 SUPM Negeri Bone telah meluluskan Siswa/siswi sebanyak 2457 orang. Sedangkan Program Studi yang dilaksanakan sebanyak 4 yaitu :

1. Teknologi Budidaya Perikanan
2. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

3. Nautika Perikanan Laut dan

4. Teknik Perikanan Laut.

#### 1. Visi Dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. *Visi organisasi* adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan organisasi tersebut yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Pernyataan visi secara rinci hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus stratejik yang jelas,
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik yang terdapat dalam sebuah organisasi
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

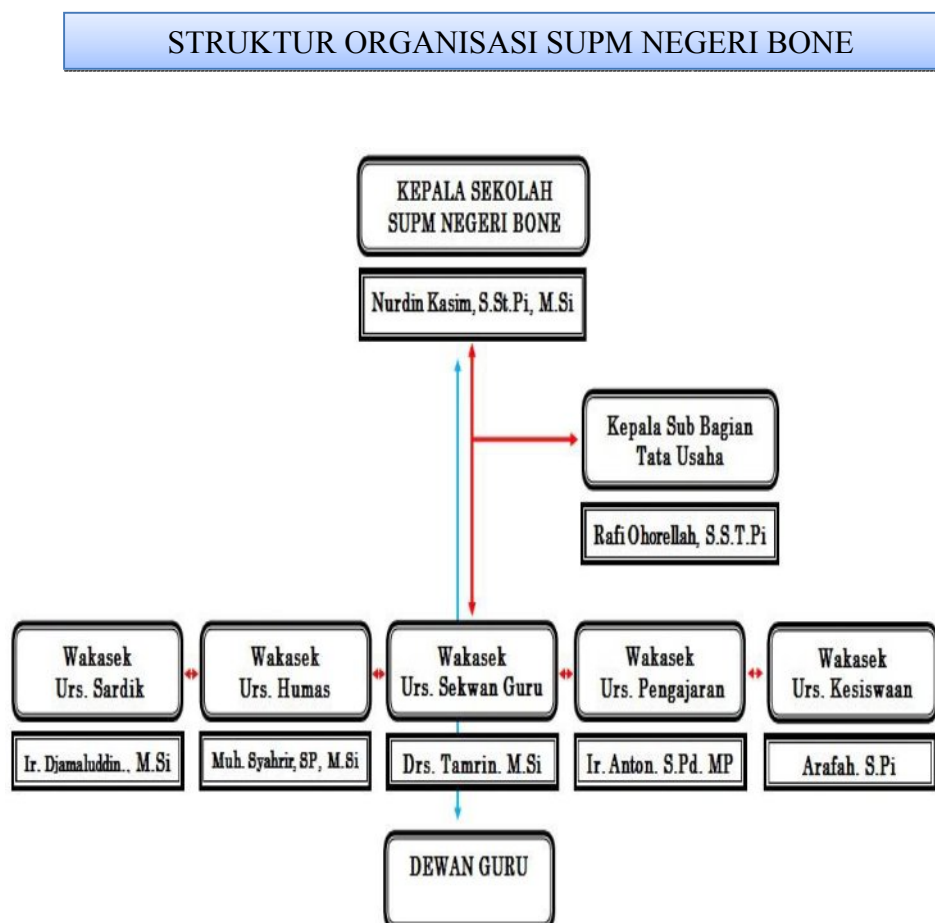
Berdasarkan definisi dan kriteria tersebut diatas, Visi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone untuk masa Rencana Strateji adalah sebagai berikut :“ Mewujudkan Lulusan yang siap Berwirausaha, Kompetitif dan Berkarakter “

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, pernyataan *Misi* Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendidikan produktif dan memiliki daya saing
2. Menyelenggarakan tata kelola sekolah dan lingkungan sekolah berakreditasi internasional
3. Pengelolaan jaringan kerja secara produktif dan sinergis
4. Berperan aktif dalam pengembangan teknologi yang relevan dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat.

## 2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri

Bone. sumber: *Lakip Supm Bone 2016*

Jumlah pegawai SUPM Bone Tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 89 orang yang dapat dibedakan menurut status kepegawaian yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai SUPM Bone Tahun 2016.

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	KEETERANGAN
1	PNS	67	-
2	PNS yang Diperbentukkan	1	-
3	Tenaga Kontrak	25	-
<b>JUMLAH</b>		89	

Sumber: LAKIP SUPM BONE TAHUN 2016

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone adalah sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone, yang selanjutnya disingkat SUPM Negeri Bone, adalah Pendidikan Menengah Kejuruan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pembinaan SUPM secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

## 2. Tugas Pokok

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah berlaku guna menghasilkan tenaga teknisi menengah perikanan yang bermoral, berjiwa bahari dan wirausaha, memiliki etos kerja yang tinggi, siap memasuki lapangan kerja, mengembangkan sikap profesional, sehingga mampu berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan.
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler
- d. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan latihan
- f. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis edukatif terhadap SMK dibidang Kelautan dan Perikanan.
- g. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua dan masyarakat.

#### 4. *Job Description* (Uraian Tugas)

Daftar uraian tugas dan tanggung jawab pegawai SUPM Negeri Bone tahun 2017 NO.002/SUPM-BN/OT.230/KEP/II/2017

1. Sub. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas : Urusan Perlengkapan, Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan.
2. Wakasek Sarana Pendidikan, yang Terdiri atas : Koordinator. U.P.PHP, Koordinator. U.P.TBP, Inst. Lab. K. Air, Koordinator. U.P.NPL, Koordinator. U.P.TPL, Instalasi Lab. Kimia, Instalasi Tambak, Instalasi Lab. Basah, Instalasi Hatchery, Instalasi Navigasi dan FG, Instalasi Lab. Fisika, Instalasi BST, Instalasi Pasca Panen, Instalasi Kapal/ Set Net, Instalasi Bengkel Latih, Instalasi Lab. Pakan, Instalasi. Lab. M. Media, dan Instalasi Lab. Hama Penyakit.
3. Wakasek Humas ( Hubungan Masyarakat ) yang terdiri atas : DATIN dan Pelaporan, Alumni/ Hubungan Kerjasama, dan Penyuluhan.
4. Sekretaris Dewan Guru yang terdiri atas : Urusan Dupak dan Urusan Pem & PenPro
5. Wakasek Pengajaran yang terdiri atas : KPK TBP, KPK TPHP, KPK NPL, KPKTPL, Koordinator TEFA, Sekjur TBP, Sekjur TPHP, Sekjur NPL, Sekjur TPL, TEFATBP, TEFA TPHP, TEFA NPL, TEFA TPL Adm. Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Instalasi Perpustakaan, Kur & Pembelajaran, Instalasi Media Pembelajaran, dan Urusan Saprasi R. Kelas.
6. Wakasek Kesiswaan yang terdiri dari : Koordinator Instalasi Asrama, Adm Kesiswaan/Piket, Instalasi Asrama Putri, Koordinator Bimbingan



Konseling, Instalasi Asrama Putra, Pembelajaran Ekstra Kurikuler,  
Koordinator Lingkungan Hidup dan Koordinator Kerohanian.

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7,762,888,646,- (84,15%) Secara umum alokasi anggaran dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan operasional pendidikan dan perkantoran, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone. Belanja Pegawai Rp. 7.554.517.232,- Serta Alokasi Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi di Bone yang Dikelolah Oleh SUPM Negeri Bone sebesar 39.031.302.600,-. Capaian Realisasi anggaran pada TA. 2016 adalah sebesar Rp 54.348.708.478,- atau sebesar 91,93%.

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	9.318.479.000,-	7.554.517,232,-	81,07
Belanja Barang	9.225.039.000,-	7.762.888.646,-	84,15
Belanja Modal	40.577.284,000,-	39.031.302.600,-	96,19
Total	59,120.802.000,-	54.348.708.478,-	91,93
Sisa Anggaran (SIAP)		4.772.093,55	8,07

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2015 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2015	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,238,379,250,-	7.554.517,232,-	4,36
Belanja Barang	6,653,079,332,-	7.762.888.646,-	16,68
Belanja Modal	52,615,422,000,-	39.031.302.600,-	(- 25,8)
Jumlah Belanja	66,506,880,582,-	54.348.708.478,-	(-18,28)

Sumber: LAKIP SUPM BONE TAHUN 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi belanja pada TA. 2015 dan TA. 2016 mengalami kenaikan pagu belanja pagu belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2016 karena adanya kenaikan tunjangan kinerja dan pembayaran gaji 13 (tiga belas) . Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal untuk satuan Pendidikan Tinggi di Bone mengalami penurunan.

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 43.737.000,- yang berasal dari Penerimaan Uang Pendidikan. Uraian target PNBP TA. 2016 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone. Realisasi PNBP untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Perbandingan realisasi PNBP 2015 dan 2016

KODE	JENIS PENERIMAAN	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2016
1	2	3	4
32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	154.828.200	537.453.388
032.12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	154.828.200	537.453.388
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	154.828.200	537.453.388
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	154.828.200	537.453.388
4231	Pendapatan dari Penjualan dan Sewa	0	0
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	0	0
42312	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	86.819.500	41.622.800
42314	Pendapatan Sewa	4.373.700	3.591.000
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Jaga	4.373.700	3.591.000
	Jumlah Penerimaan 4231	4.373.700	3.591.000

4235	Pendapatan Pendidikan		
42351	Pendapatan Pendidikan	29.880.000	0
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	0	0
423512	Pendapatan Uang ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, & Akhir Pendidikan	29.880.000	0
	Jumlah Penerimaan 4235	29.880.000	0
4237	Pendapatan luran dan Denda		
42375	Pendapatan Denda	0	0
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek. Pemerintah	0	0
	Jumlah Penerimaan 4237	0	0
4239	Pendapatan Lain-lain		
4E+06	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	0	465.952.500
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	0	21.637.088
	Jumlah Penerimaan 4239	0	487.589.588
423129	Pendapatan Aset Lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	25.630.000	0
	Pendapatan lain-lain	8.125.000	0
		154.828.200	537.094.288

Sumber: LAKIP SUPM BONE TAHUN 2016

Kenaikan penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 antara lain disebabkan karena adanya setoran uang dari pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara.

### **1. Rencana Strategis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone**

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone sebagai salah satu lembaga telah menyusun rencana strategik selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2015-2017 dengan memperhitungkan potensi peluang, dan kendala yang ada atau kemungkinan timbul. Rencana strategik mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan

sasaran terbesar akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan sasaran kinerja yang ingin dicapai akan di jelaskan dalam Rencana Kinerja (RENJA).

Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pembangunan Daerah era otonomi menghadapi berbagai tantangan baik tantangan internal maupun eksternal yang menuntut adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap tantangan dan masalah, kesiapan perencanaan dan pengelolaan dan bekerjasama dengan semua unsur serta mempunyai komitmen bersama dalam pelaksanaan program pembangunan. Upaya pembangunan yang masih sangat kuat berorientasi sektoral dan kurang memperhatikan karakteristik dan kondisi sumber daya suatu daerah serta terbatasnya sumber daya pembangunan akan semakin memperburuk kesenjangan dan kemiskinan.

## **2. Rencana Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone**

Dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri, sebagai unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat. Melaksanakan pendidikan menengah

kejuruan di bidang perikanan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna menghasilkan tenaga teknis menengah perikanan yang bermoral, berjiwa bahari dan wirausaha, memiliki etos kerja yang tinggi, SUPM Negeri Bone sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP dibawah BPSDMP KP secara umum bertujuan untuk melaksanakan pendidikan vokasi dan menyediakan tenaga terdidik yang kompeten dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan perbandingan teori 30 % dan praktek 70 % melalui pendekatan *teaching factory*.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone Tahun 2016**

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone, mengelompokkan indikator-indikator kinerja menjadi indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil). Sedangkan untuk indikator indikator kinerja berupa *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) tidak dimasukkan karena kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja suatu kegiatan yang bersifat jangka panjang (5 tahun) dimana kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone, menetapkan indikator kinerja input umumnya terdiri dari tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM), dan bahan. Indikator kinerja output dirumuskan berdasarkan keluaran dari masing-masing kegiatan. Sedangkan indikator outcome ditetapkan berdasarkan hasil dari suatu kegiatan yang dapat berupa penyelesaian kegiatan secara benar dan tepat waktu maupun terselesaikannya kegiatan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pencapaian kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone dapat dilihat pada kertas kerja LAKIP yang terlampir berupa anggaran, realisasi, pendapatan dan belanja. Dimana secara umum Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone dalam upaya mencapai visi dan misi menetapkan 4 tujuan yang dijabarkan dalam 20 kelompok indikator sasaran yang dijabarkan dalam 9 kegiatan dalam periode anggaran tahun 2016.

Berdasarkan LAKIP tahun 2016 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerjanya telah mencapai predikat kinerja yang baik. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone berdasarkan ketentuan mengenai tugas pokok fungsi dan rencana kerja tahunan telah memperoleh keberhasilan yang ditunjukkan dengan indikator capaian outcome sebesar 100%, dari hasil Evaluasi Kinerja SUPM Bone tahun 2016 dapat diketahui bahwa Jumlah lulusan pendidikan Kelautan dan Perikanan SUPM Bone Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebesar 186 orang atau sebesar 100 % dari target Lulusan yaitu 186 orang, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa SUPM Bone dapat mencapai sasaran program atau berhasil

Meningkatnya Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan terdidik yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang Kelautan dan Perikanan dan capaian sasaran jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan sebesar 100% yaitu dari target 186 orang dapat tercapai sejumlah 186 orang, hal ini menunjukkan bahwa capaian ini telah sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Sebagaimana SUPM sebagai unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Bone pada Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) sebesar Rp. 59.120.802.000 ,- self blocking sebesar Rp. 4.624.128.000,- dan anggaran yang digunakan Rp.54.348.708.000,- dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 54.348.708.000,- atau 91,93%. Sehingga dapat dikatakan bahwa SUPM Bone dapat melebihi target dari target nilai Efisiensi Anggaran 83 % sehingga pencapaian target kinerjanya menjadi 105 %.

Pelaksanaan Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7,762,888,646,- (84,15%) Secara umum alokasi anggaran dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan operasional pendidikan dan perkantoran, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone. Belanja Pegawai Rp. 7.554.517.232,- Serta Alokasi Anggaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi di Bone yang Dikelolah oleh SUPM Negeri Bone sebesar 39.031.302.600,-. Capaian Realisasi anggaran pada TA. 2016 adalah sebesar Rp 54.348.708.478,- atau sebesar 91,93%.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan,

1. Secara keseluruhan kinerja kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone yang berupa anggaran, realisasi ,pendapatan dan belanja secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dan dari sisi *input*, *output* maupun *outcome* terhadap rencana maupun target yang telah ditentukan.
2. Dari target yang ditentukan terhadap perencanaan dan monitoring evaluasi, bahwa capaian sasaran perencanaan dan monitoring evaluasi sebesar 100 % terlaksana dengan baik. dimana kegiatan peengelolaan keuangan menunjukkan capaian kinerja yang optimal.

#### B. Saran

1. Agar Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone mampu menghasilkan lulusan peserta didik yang profesional dan menjadi institusi pendidikan yang berstandar internasional, Terserap di Dunia Usaha dan Industri serta mampu mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi, untuk itu di perlukan dukungan segenap peserta didik dan dukungan perencanaan ke depan
2. Peningkatan kompetensi para lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone dengan memperbanyak jenis pelatihan dan keahlian sehingga dapat bersaing di dunia usaha dan dunia ndustri.

3. Peningkatan sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan dan menarik animo masyarakat untuk mendaftar menjadi taruna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G., dan Anggarini, Y. 2017. *Anggaran Bisnis*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Alfira Sofia Dan Bagus Husen, *Analisis transparansi dan Akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website*, Vol.12 No.4 April 2013.
- Darwanis dan Sephi Chairunnisa, *Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013.
- Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri, *Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru Indonesia, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), (Empirical Study On the regional work units Pekanbaru)*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini, dan Ida Bagus Putra Astika, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia, Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.09 (2015) : 571-598*.
- Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, dan Pahala (2014). *Accounting and Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran*. Vol. 5 No. 2/11/ 2014.
- Herlianto, D. 2015. *Anggaran Keuangan*. Gosyen Publishing. Yogyakarta
- Indoskripsi. 2008. *Definisi Kinerja dan pengukuran Kinerja Akuntansi Sektor Publik*, (online), (<http://one.indoskripsi.com/category/matakuliah/akuntansi-sektor-publik>, diakses Juli 2013).
- Komang sri endrayani, Made pradana adi putra, dan Nyoman ari sonya darmawan, *Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada dinas kehutanan UPT KPH Bali tengah kota singa raja)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.
- Mentari Cefrida S ,Dr. Emrinaldi Nur DP, SE, M.Si, Ak ,H. Mudrika Alamsyah dan Hasan, SE. M.Si 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru*. Vol. 1 no. 2/2014.

Ni Kadek Rina Primayoni, Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana, *Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung)*, Volume 2 No: 1 Tahun 2014.

Susilowati, Harini. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja keuangan pemerintah daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman, *Jurusan akuntansi ekonomika dan bisnis Universitas Deponegoro, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian intern Sebagai variable intervening (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota salatiga)*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013.

Yulianti. Reni, Hardi dan Rusli. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. JOM FEKON Vol.1 No. 2 Oktober 2014.

<http://www.akuntansilengkap.com/penelitian/pengertian-variabel-independen-dependen-moderating-serta-intervening-lengkap/>

<http://fandiprasetiyo.blogspot.co.id/2014/02/komitmen-organisasional.html?m=1>

<http://ngabblax.blogspot.co.id/2011/12/partisipasi-penganggaran-konsep-prinsip.html?m=1>

# LAMPIRAN

LAPORAN PAGU DAN REALISASI BELANJA  
BULAN: s/d MARET 2016

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total		
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer			
1	032-42760 2	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONE	055	PAGU	9,318,479,000	9,225,039,000	40,577,284,000	0	0	0	0	0	0	59,120,802,000		
				REALISASI	7,554,517,232	7,762,888,646	39,031,302,600	0	0	0	0	0	0	54,348,708,478		
				PERSENTASE	(81.07%)	(84.15%)	(96.19%)	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	(91.93%)		
				SISA	1,763,961,768	1,462,150,354	1,545,981,400	0	0	0	0	0	0	4,772,093,522		
GRAND TOTAL				PAGU	9,318,479,000	9,225,039,000	40,577,284,000	0	0	0	0	0	0	0	59,120,802,000	
				REALISASI	7,554,517,232	7,762,888,646	39,031,302,600	0	0	0	0	0	0	0	0	54,348,708,478
				PERSENTASE	(81.07%)	(84.15%)	(96.19%)	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%			(91.93%)
				SISA	1,763,961,768	1,462,150,354	1,545,981,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,093,522

**LAPORAN REALISASI  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONE**

Bulan : Desember

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
05	Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	54.496.674.000	54.329.426.834	167.247.166
2376		54.496.674.000	54.329.426.834	167.247.166
2376.001	Peserta Didik Yang Kompeten	44.472.459.000	44.431.440.500	41.018.500
2376.001.001	tanpa sub output	44.472.459.000	44.431.440.500	41.018.500
051	<b>Penerimaan Siswa Baru</b>	45.250.000	45.162.700	87.300
A	tanpa sub komponen	45.250.000	45.162.700	87.300
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	11.250.000	11.250.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	4.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	30.000.000	29.912.700	87.300
052	<b>Pengajaran/Perkuliahan</b>	458.090.000	432.729.000	25.361.000
A	Pengajaran / Perkuliahan	458.090.000	432.729.000	25.361.000
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	115.000.000	114.945.000	55.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	250.090.000	236.986.000	13.104.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.000.000	45.000.000	0
522151	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Jasa Profesi	0	0	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	48.000.000	35.798.000	12.202.000
053	<b>Praktek Reguler /Harian/Klasikal/Teaching Factory</b>	240.000.000	238.810.000	1.190.000
A	tanpa sub komponen	240.000.000	238.810.000	1.190.000
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	240.000.000	238.810.000	1.190.000
054	<b>Praktek Lapang</b>	408.250.000	399.345.000	8.905.000
A	Program Keahlian Nautika Perikanan Laut	121.400.000	119.595.000	1.805.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	12.100.000	12.100.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	94.800.000	92.995.000	1.805.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	13.500.000	13.500.000	0
B	Program Keahlian Budidaya Perikanan	164.350.000	168.350.000	-4.000.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	16.650.000	16.650.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	126.200.000	130.700.000	-4.500.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	2.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	19.500.000	19.000.000	500.000
C	Program Keahlian Pengolahan Hasil Perikanan	74.750.000	72.650.000	2.100.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	8.250.000	8.250.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52.000.000	51.400.000	600.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	13.500.000	12.000.000	1.500.000
D	Program Keahlian Teknik Perikanan	47.750.000	38.750.000	9.000.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	750.000	750.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	47.000.000	38.000.000	9.000.000
055	<b>Praktek Laut</b>	233.806.000	242.250.000	-8.444.000
A	tanpa sub komponen	233.806.000	242.250.000	-8.444.000
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	161.306.000	160.350.000	956.000
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	72.500.000	81.900.000	-9.400.000
523121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
056	<b>Kewirausahaan Bagi Peserta Didik Pendidikan KP</b>	0	0	0
A	tanpa sub komponen	0	0	0
521219	[00000000-D-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
057	<b>Sertifikasi Peserta Didik</b>	541.000.000	528.837.200	12.162.800
A	BST	94.000.000	94.000.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90.000.000	90.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	4.000.000	4.000.000	0
B	ANKAPIN	114.000.000	113.829.200	170.800
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	93.000.000	93.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.500.000	4.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	16.500.000	16.329.200	170.800
C	UJI KOMPETENSI	162.000.000	153.300.000	8.700.000
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	38.500.000	38.500.000	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	115.500.000	106.800.000	8.700.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.000.000	8.000.000	0
D	HACCP	52.500.000	49.440.000	3.060.000
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36.000.000	36.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	16.500.000	13.440.000	3.060.000
E	MPM CPIB	118.500.000	118.268.000	232.000
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	102.000.000	102.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	16.500.000	16.268.000	232.000
058	<b>Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama</b>	0	0	0
A	Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama ( 44% dari Penerimaan)	0	0	0
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
059	<b>Bahan Makan Siswa</b>	3.470.780.000	3.469.184.000	1.596.000
A	tanpa sub komponen	3.470.780.000	3.469.184.000	1.596.000
521112	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	3.470.780.000	3.469.184.000	1.596.000
060	<b>Wisuda Pendidikan KP</b>	43.820.000	43.820.000	0
A	tanpa sub komponen	43.820.000	43.820.000	0
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	36.320.000	36.320.000	0
522141	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Sewa	7.500.000	7.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0
061	<b>Sarana Satuan Pendidikan Menengah Bone ( SUPM)</b>	2.434.090.000	2.434.031.000	59.000
A	tanpa sub komponen	2.434.090.000	2.434.031.000	59.000
532111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.700.000	231.700.000	0

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
533121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.202.390.000	2.202.331.000	59.000
062	<b>Sarana Satuan Pendidikan Tinggi Bone</b>	36.597.373.000	36.597.271.600	101.400
A	<u>tanpa sub komponen</u>	36.597.373.000	36.597.271.600	101.400
531111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Tanah	4.978.390.000	4.967.294.000	11.096.000
533111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.993.294.000	21.991.586.800	1.707.200
534111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.473.221.000	5.442.316.000	30.905.000
534121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Irigasi	2.490.235.000	2.554.240.800	-64.005.800
534131	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Modal Jaringan	1.662.233.000	1.641.834.000	20.399.000
<b>2376.002</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan KP</b>	<b>139.150.000</b>	<b>133.115.000</b>	<b>6.035.000</b>
<b>2376.002.001</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>139.150.000</b>	<b>133.115.000</b>	<b>6.035.000</b>
051	<b>Perencanaan, Program dan Anggaran</b>	78.650.000	72.655.000	5.995.000
A	<u>tanpa sub komponen</u>	78.650.000	72.655.000	5.995.000
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	900.000	900.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	5.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	72.750.000	66.755.000	5.995.000
052	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	60.500.000	60.460.000	40.000
A	<u>Monitoring dan Evaluasi</u>	26.500.000	26.460.000	40.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	10.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	16.500.000	16.460.000	40.000
B	<u>Pelaporan</u>	34.000.000	34.000.000	0
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	24.000.000	24.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	10.000.000	0
<b>2376.004</b>	<b>Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan KP</b>	<b>181.000.000</b>	<b>163.899.000</b>	<b>17.101.000</b>
<b>2376.004.001</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>181.000.000</b>	<b>163.899.000</b>	<b>17.101.000</b>
051	<b>Kelembagaan Pendidikan KP</b>	10.000.000	0	10.000.000
A	<u>Akreditasi Satuan Pendidikan KP</u>	10.000.000	0	10.000.000
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	0	10.000.000
052	<b>Ketenagaan Pendidikan KP</b>	171.000.000	163.899.000	7.101.000
A	<u>Sekolah Lapang KP</u>	150.000.000	143.316.000	6.684.000
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	82.500.000	82.500.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	67.500.000	60.816.000	6.684.000
B	<u>Kompetensi SDM Pendidik/Tenaga Kependidikan/ Aparatur</u>	21.000.000	20.583.000	417.000
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	21.000.000	20.583.000	417.000
<b>2376.005</b>	<b>Administrasi Ketatausahaan Pendidikan KP</b>	<b>271.150.000</b>	<b>247.889.100</b>	<b>23.260.900</b>
<b>2376.005.001</b>	<b>tanpa sub output</b>	<b>271.150.000</b>	<b>247.889.100</b>	<b>23.260.900</b>
051	<b>Pengelolaan Ketatausahaan</b>	128.650.000	121.771.900	6.878.100
A	<u>Ketatausahaan</u>	4.900.000	4.900.000	0
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	900.000	900.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	4.000.000	0
B	<u>Perjalanan Pimpinan</u>	123.750.000	116.871.900	6.878.100
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	123.750.000	116.871.900	6.878.100
052	<b>Sistam Akuntansi Instansi Pemerintahan</b>	101.500.000	94.531.200	6.968.800
A	<u>tanpa sub komponen</u>	101.500.000	94.531.200	6.968.800
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	34.800.000	27.900.000	6.900.000
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.250.000	5.250.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	51.250.000	51.181.200	68.800
524113	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.200.000	10.200.000	0
053	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	41.000.000	31.586.000	9.414.000
A	<u>Administrasi Pengelolaan Kepegawaian</u>	32.750.000	31.586.000	1.164.000
521211	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Bahan	3.000.000	3.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	5.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	24.750.000	23.586.000	1.164.000
B	<u>Balance Score Card ( BSC )</u>	8.250.000	0	8.250.000
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	8.250.000	0	8.250.000
<b>2376.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>9.432.915.000</b>	<b>9.353.083.234</b>	<b>79.831.766</b>
<b>2376.994.001</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>9.432.915.000</b>	<b>9.353.083.234</b>	<b>79.831.766</b>
001	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	7.560.745.000	7.555.495.588	5.249.412
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	7.560.745.000	7.555.495.588	5.249.412
511111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Gaji Pokok PNS	3.075.595.000	3.075.546.880	48.120
511119	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.000	46.287	23.713
511121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216.458.000	216.453.690	4.310
511122	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. Anak PNS	69.912.000	69.817.336	94.664
511123	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. Struktural PNS	7.020.000	7.020.000	0
511124	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. Fungsional PNS	171.710.000	171.660.000	50.000
511125	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. PPh PNS	27.507.000	27.534.020	-27.020
511126	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunj. Beras PNS	172.001.000	171.852.660	148.340
511129	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Uang Makan PNS	468.236.000	468.226.000	10.000
511151	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunjangan Umum PNS	56.135.000	56.135.000	0
511152	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Tunjangan Profesi Guru	1.132.032.000	1.128.842.200	3.189.800
512411	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Pegawai ( Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.164.069.000	2.162.361.515	1.707.485
002	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>	1.872.170.000	1.797.587.646	74.582.354
A	<u>Poliklinik/Obat-obatan</u>	50.400.000	50.396.400	3.600
521219	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30.000.000	29.996.400	3.600
522151	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Jasa Profesi	20.400.000	20.400.000	0
B	<u>Pengadaan Pakaian Dinas</u>	49.300.000	49.300.000	0
521111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Keperluan Perkantoran	49.300.000	49.300.000	0
C	<u>Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu</u>	60.000.000	60.000.000	0
521111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Keperluan Perkantoran	60.000.000	60.000.000	0
D	<u>Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi</u>	1.000.000	450.000	550.000
521111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Keperluan Perkantoran	1.000.000	450.000	550.000
E	<u>Pemeliharaan Gedung Kantor</u>	45.000.000	45.000.000	0
523111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	45.000.000	45.000.000	0
G	<u>Pemeliharaan Sarana Kantor</u>	72.750.000	72.583.200	166.800

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]



Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
523121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.750.000	72.583.200	166.800
H	<u>Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10</u>	130.600.000	129.461.920	1.138.080
523121	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.600.000	129.461.920	1.138.080
I	<u>Pemeliharaan Jaringan</u>	50.000.000	49.900.000	100.000
523133	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	50.000.000	49.900.000	100.000
J	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>	402.000.000	359.908.526	42.091.474
522111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Langganan Listrik	313.200.000	283.740.117	29.459.883
522112	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Langganan Telepon	36.000.000	23.401.759	12.598.241
522119	[00000000-A-0-0-055-19-05] Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	52.800.000	52.766.650	33.350
K	<u>Jasa POS/Giro/Sertifikat</u>	8.400.000	8.306.600	93.400
521114	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.400.000	8.306.600	93.400
M	<u>Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pendidikan Menengah ( SUPM Bone )</u>	803.800.000	776.931.000	26.869.000
521111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Keperluan Perkantoran	789.400.000	775.311.000	14.089.000
524111	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Biasa	12.000.000	0	12.000.000
524113	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.400.000	1.620.000	780.000
O	<u>Administrasi Kegiatan</u>	198.920.000	195.350.000	3.570.000
521115	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	175.440.000	175.440.000	0
521213	[00000000-A-0-0-055-19-05] Belanja Honor Output Kegiatan	23.480.000	19.910.000	3.570.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 14-03-2017  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 032.12.19.427602.000 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	22,965,000	0	22,965,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	6,320,000	0	6,320,000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0	0	0
117131	Bahan Baku	15,415,000	0	15,415,000
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	9,723,247,300	0	9,723,247,300
132111	Peralatan dan Mesin	24,299,703,837	9,871,035,841	14,428,667,996
133111	Gedung dan Bangunan	63,675,291,395	3,507,582,975	60,167,708,420
134111	Jalan dan Jembatan	1,045,400,000	316,083,750	729,316,250
134112	Irigasi	101,245,800	33,361,076	67,884,724
134113	Jaringan	777,950,080	59,696,141	718,253,939
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	187,346,500	0	187,346,500
135121	Aset Tetap Lainnya	462,210,187	300,476,134	161,734,053
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162121	Hak Cipta	25,000,000	0	25,000,000
162151	Software	20,000,000	0	20,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
J U M L A H		100,362,095,099	14,088,235,917	86,273,859,182

BONE, 30 Juni 2016  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Sekolah

Nurdin Kasim, S.St.Pi, M.Si  
 197101141998031005

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 14-03-2017  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 032.12.19.427602.000 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	13,935,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117114	Suku Cadang	1,800,000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	2,775,000
117199	Persediaan Lainnya	0
131111	Tanah	14,690,541,300
132111	Peralatan dan Mesin	24,515,722,837
133111	Gedung dan Bangunan	84,528,459,406
134111	Jalan dan Jembatan	5,402,207,785
134112	Irigasi	6,890,395,729
134113	Jaringan	2,419,784,080
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	187,346,500
135121	Aset Tetap Lainnya	462,210,187
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 12,269,174,151)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 5,170,507,906)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	( 646,126,639)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	( 266,973,098)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	( 104,164,015)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	( 337,976,000)
162121	Hak Cipta	25,000,000
162151	Software	20,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	( 1,785,713)
169315	Akumulasi Amortisasi software	( 20,000,000)
J U M L A H		120,343,470,302

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016  
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 14-03-2017  
Halaman : 2  
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 032.12.19.427602.000 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3

BONE, 30 Juni 2016

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Sekolah

Nurdin Kasim, S.St.Pi, M.Si  
197101141998031005



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONE**

JLN. SUNGAI MUSI KM. 8 KOTAK POS 119 WATAMPONE 92701 SULAWESI SELATAN  
TELEPON (0481) 2912967 FAXIMILE (0481) 2912966  
Email : supm\_negeri\_bone@yahoo.co.id

Nomor : 897/BRSDM.SUPM-BN/TU.210/X/2018  
Lamp :  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

29 Oktober 2018

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan S1 Akuntansi  
Bapak Ismail Badollahi, S.E., M.Si.AK., CA.CSP  
Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor:013/05/c.4-II/IX/39/2018 Taggal 24 September 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ristina  
Nim : 105730503614  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)

Diberikan izin untuk melakukan penelitian di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone sesuai dengan aturan yang berlaku di SUPM Bone,

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Kepala Sekolah, ,

**Nurdia Kasim, S.St.Pi, M.Si**  
**NIP. 19710114 199803 1 005**

## BIOGRAFI PENULIS



**WAHYU RISTINA**, lahir di Sinjai pada tanggal 27 september 1996. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Ponijo dengan Ibunda Dariani. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Sulobaja di Kabupaten Mamuju Tengah, tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Budongbudong tamat tahun 2011 dan dilanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Tobadak tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone”.